

SINOPSIS

Dalam skripsi ini mengambil judul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PROGRAM KELUARGA BERENCANA DI ERA OTONOMI DAERAH" Latar belakang masalah yang diteliti yaitu mengenai pelaksanaan program keluarga berencana nasional di era otonomi. Masalah pertumbuhan penduduk yang masih tinggi di Kabupaten Bantul dengan hanya diimbangi oleh keadaan perekonomian yang sangat terbatas, sehingga hal tersebut menjadi kurang seimbang, yang berdampak pada munculnya permasalahan-permasalahan sosial dan bidang-bidang lainnya yang kian kompleks dari waktu ke waktu. Berdasarkan Perda no. 41 tahun 2000 diharapkan program keluarga berencana ini dapat menurunkan jumlah pertumbuhan penduduk, agar tidak melebihi kemampuan daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana sosial yang ada di Kabupaten Bantul. Dari uraian latar belakang tersebut di atas maka data dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

"Bagaimanakah Implementasi Program Keluarga Berencana Berdasarkan Perda No. 41 tahun 2000 di Kabupaten Bantul tahun 2004?"

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif dimana data-data yang sudah ada atau terkumpul yang diperoleh dari responden atau contoh lapangan yang kemudian diinterpretasikan menurut jenisnya dan disusun secara logis untuk menjawab permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program KB di Kabupaten Bantul pada umumnya berjalan dengan lancar karena kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada Badan Kesejahteraan Keluarga (BKK) dapat terlaksana dalam bentuk program-program pokok. Program-program pokok tersebut tentu saja tidak terlepas dari indikator-indikator pendukungnya antara lain *Pertama* aspek komunikasi yang baik dilakukan oleh petugas kepada akseptor KB akan mendukung meningkatnya kesejahteraan dan kualitas keluarga pada masyarakat Bantul. *Kedua* aspek sumber daya, adanya tenaga ahli dan tersedianya dana yang cukup maka pelaksanaan program KB akan berjalan lancar. *Ketiga* sikap pelaksana petugas memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat akan berdampak pada kepuasan bagi masyarakat. *Keempat* aspek struktur organisasi, pelimpahan kewenangan program KB dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Kesejahteraan Keluarga. *Kelima* aspek sarana dan prasarana yang ada haruslah dapat mendukung, karena besar sekali pengaruhnya sebagai penunjang pelaksanaan program KB. Jadi pelaksanaan program Keluarga Berencana yang merupakan program nasional yang bertujuan mensejahterakan masyarakat pada umumnya masuk dalam kategori cukup baik.

Maka penulis menyimpulkan berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, bahwa pelaksanaan program KB dinilai cukup baik walaupun masih terdapat sedikit yang kurang baik. Hal ini berarti pelayanan yang diberikan Badan Kesejahteraan Keluarga perlu diperhatikan dan ditingkatkan agar kualitas pelayanan terhadap masyarakat akseptor KB tidak terkesan negatif. Sehingga im-
program KB tersebut yang dilakukan oleh Badan Kesejahteraan Kelua
tent pada tujuannya dan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat